



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 1094/PY.01.1-SD/06/KPU/VIII/2019 Jakarta, 7 Agustus 2019
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Tindak Lanjut Putusan
Mahkamah Konstitusi

- Yth. 1. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh
2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota

Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 6 Agustus 2019 berkenaan dengan beberapa perkara PHPU DPR-DPRD (daftar terlampir), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota segera menetapkan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi/DPR Aceh dan DPRD Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada;
 - a. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.
 - b. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan kelima atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menjadwalkan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Provinsi/DPR Aceh dan DPRD Kabupaten/Kota paling lama 5 (lima) hari setelah salinan penetapan atau Putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU. Batas waktu 5 (lima) hari dihitung sejak Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diunggah di JDIH KPU
2. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib mencantumkan Nomor Perkara Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 6 Agustus 2019 dalam

beberapa perkara PHPU DPR-DPRD pada bagian “konsideran memperhatikan” Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota (daftar terlampir).

3. KPU Provinsi/KIP Aceh segera menyampaikan Berita Acara dan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik beserta lampirannya serta Berita Acara, dan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi/DPR Aceh kepada KPU.
4. KPU/KIP Kabupaten/Kota segera menyampaikan Berita Acara dan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik beserta lampirannya serta Berita Acara, dan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU.
5. KPU Provinsi/KIP Aceh segera mengusulkan nama-nama calon terpilih Anggota DPRD Provinsi/DPR Aceh kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur guna keperluan pengucapan sumpah janji Anggota DPRD Provinsi/DPR Aceh.
6. KPU/KIP Kabupaten/Kota segera mengusulkan nama-nama calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota guna keperluan pengucapan sumpah janji Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan, terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia



REKAP AMAR PUTUSAN PHPU PILEG 2019

6 AGUSTUS 2019 – 09.00

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Dapil	Amar Putusan
1.	187-05-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Tahun 2019	Partai Nasional Demokrat (Partai NasDem)	Sulbar 1; Mamuju Utara 2	<p><u>Dalam Eksepsi:</u> Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;</p> <p><u>Dalam Pokok Permohonan:</u> Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya.</p>
2.	164-02-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Tahun 2019	Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra)	Sulbar 7	<p><u>Dalam Eksepsi:</u> Menolak Eksepsi Termohon; Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;</p> <p><u>Dalam Pokok Permohonan:</u> Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.</p>
3.	82-03-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Tahun 2019	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	SULBAR	<p><u>Dalam Eksepsi:</u> Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;</p> <p><u>Dalam Pokok Permohonan:</u> Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya.</p>
4.	177-04-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Tahun 2019	Partai Golongan Karya (Partai Golkar)	SULBAR; Sulbar 4; Majene 1	<p><u>Dalam Eksepsi:</u> Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;</p> <p><u>Dalam Pokok Permohonan:</u> Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya.</p>

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Dapil	Amar Putusan
5.	38-13-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Tahun 2019	Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura)	Mamuju Tengah 1	<u>Dalam Eksepsi:</u> Menolak Eksepsi Termohon; <u>Dalam Pokok Permohonan:</u> Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya.
6.	237-07-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Tahun 2019	Partai Beringin Karya (Partai Berkarya)	?	<u>(Ketetapan)</u> Menyatakan Permohonan Pemohon Gugur
7.	241-06-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Tahun 2019	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda)	Mamasa 3	<u>Dalam Eksepsi:</u> Mengabulkan Eksepsi Termohon, sepanjang mengenai Permohonan Pemohon Tidak Jelas atau Kabur; Menolak Eksepsi Termohon untuk selain dan selebihnya; <u>Dalam Pokok Permohonan:</u> Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.
8.	217-07-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2019	Partai Beringin Karya (Partai Berkarya)	?	<u>(Ketetapan)</u> Menyatakan Permohonan Pemohon Gugur.
9.	120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2019	Partai Amanat Nasional (PAN)	Lembata 3	<u>Dalam Eksepsi:</u> Menolak Eksepsi Termohon; <u>Dalam Pokok Permohonan:</u> Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya.

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Dapil	Amar Putusan
10.	100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2019	Partai Bulan Bintang (PBB)	Alor 4	<p><u>Dalam Eksepsi:</u> Menolak Eksepsi Termohon;</p> <p><u>Dalam Pokok Permohonan:</u> Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya.</p>
11.	159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2019	Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra)	NTT II; Kupang 4	<p><u>Dalam Eksepsi:</u> Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait, sepanjang mengenai Permohonan Pemohon Tidak Jelas atau Kabur; Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya;</p> <p><u>Dalam Pokok Permohonan:</u> Mengabulkan Penarikan Kembali Permohonan Pemohon untuk Dapil Kupang 4; Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.</p>
12.	39-13-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2019	Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura)	Rote Ndao 1	<p><u>Dalam Eksepsi:</u> Menolak Eksepsi Termohon;</p> <p><u>Dalam Pokok Permohonan:</u> Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya.</p>
13.	245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2019	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda)	Alor 4; Flores Timur 1	<p><u>Dalam Eksepsi:</u> Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait, sepanjang mengenai Permohonan Pemohon Tidak Jelas atau Kabur;</p>

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Dapil	Amar Putusan
					Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait, untuk selain dan selebihnya; <u>Dalam Pokok Permohonan:</u> Mengabulkan Penarikan Kembali Permohonan Pemohon untuk Dapil Alor 4; Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.
14.	193-05-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Riau Tahun 2019	Partai Nasional Demokrat (Partai NasDem)	Bengkalis 3; Bengkalis 5; Siak 3	<u>Dalam Eksepsi:</u> Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait; <u>Dalam Pokok Permohonan:</u> Mengabulkan Penarikan Kembali Permohonan Pemohon untuk Dapil Siak 3; Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
15.	70-03-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Riau Tahun 2019	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	Bengkalis 4; Bengkalis 5; Indragiri Hilir 4; Siak 4	<u>Dalam Eksepsi:</u> Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait; <u>Dalam Pokok Permohonan:</u> Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
16.	152-02-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Riau Tahun 2019	Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra)	RIAU I; RIAU II; Riau 2	<u>Dalam Eksepsi:</u> Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya; <u>Dalam Pokok Permohonan:</u> Menyatakan Permohonan Gugur, sepanjang

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Dapil	Amar Putusan
					Perseorangan DPR RI Dapil RIAU I atas nama Dan Perseorangan DPRD Provinsi Riau Dapil Riau 2 atas nama Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima, sepanjang Perseorangan DPR RI Dapil RIAU II atas nama
17.	34-13-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Riau Tahun 2019	Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura)	Riau 8; Kota Pekanbaru 2	<p><u>Dalam Eksepsi:</u> Mengabulkan Eksepsi Termohon, sepanjang mengenai Permohonan Pemohon Salah Obyek Perkara atau <i>Error in Objectum</i>, sepanjang Permohonan Pemohon untuk Dapil Kota Pekanbaru 2; Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon, sepanjang Permohonan Pemohon untuk Dapil Kota Pekanbaru 2;</p> <p><u>Dalam Pokok Permohonan:</u> Mengabulkan Penarikan Kembali Permohonan Pemohon untuk Dapil Riau 8; Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima, sepanjang Permohonan Pemohon untuk Dapil Kota Pekanbaru 2.</p>
18.	212-07-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Riau Tahun 2019	Partai Beringin Karya (Partai Berkarya)	?	<p><u>(Ketetapan)</u> Menyatakan Permohonan Pemohon Gugur.</p>

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Dapil	Amar Putusan
19.	17-01-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Riau Tahun 2019	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Kuantan Singingi 3	<u>(Ketetapan)</u> Menyatakan Permohonan Pemohon Gugur.
20.	240-06-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Riau Tahun 2019	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda)	Kota Dumai 4	<u>(Ketetapan)</u> Menyatakan Permohonan Pemohon Gugur.

REKAP AMAR PUTUSAN PHPU PILEG 2019

6 AGUSTUS 2019 – 14.00

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Dapil	Putusan
1.	28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Bengkulu Tahun 2019	Partai Kebangkitan Bangsa (Perseorangan)	Bengkulu Selatan 3	<p><u>Dalam Eksepsi:</u> Mengabulkan Eksepsi Termohon sepanjang mengenai Kedudukan Hukum atau <i>Legal Standing</i> Pemohon; Menolak Eksepsi Termohon, untuk selain dan selebihnya;</p> <p><u>Dalam Pokok Permohonan:</u> Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.</p>
2.	236-07-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Lampung Tahun 2019	Partai Beringin Karya (Partai Berkarya)	?	<p><u>(Ketetapan)</u> Menyatakan Permohonan Pemohon Gugur.</p>
3.	223-07-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019	Partai Beringin Karya (Partai Berkarya)	?	<p><u>(Ketetapan)</u> Menyatakan Permohonan Pemohon Gugur.</p>
4.	105-10-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Kota Batam 6	<p><u>Dalam Eksepsi:</u> Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk sebagian, sepanjang mengenai Permohonan Pemohon Tidak Jelas atau Kabur Menolak Eksepsi Termohon, untuk selain dan selebihnya;</p>

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Dapil	Putusan
					Dalam Pokok Permohonan: Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.
5.	112-10-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Tahun 2019	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Jateng 8	(Ketetapan) Mengabulkan Penarikan Kembali Permohonan Pemohon.
6.	225-07-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi DI Yogyakarta (DIY) Tahun 2019	Partai Beringin Karya (Partai Berkarya)	?	(Ketetapan) Menyatakan Permohonan Pemohon Gugur.
7.	128-12-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Banten Tahun 2019	Partai Amanat Nasional (PAN)	Serang 2	(Ketetapan) Mengabulkan Penarikan Kembali Permohonan Pemohon.
8.	169-04-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Banten Tahun 2019	Partai Golongan Karya (Partai Golkar)	Tangerang 5	(Ketetapan) Menyatakan Permohonan Pemohon Gugur.
9.	230-07-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Bali Tahun 2019	Partai Beringin Karya (Partai Berkarya)	?	(Ketetapan) Menyatakan Permohonan Pemohon Gugur.
10.	222-07-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Tahun 2019	Partai Beringin Karya (Partai Berkarya)	?	(Ketetapan) Menyatakan Permohonan Pemohon Gugur.
11.	220-07-30/PHPU.DPR-	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Gorontalo	Partai Beringin Karya (Partai Berkarya)	?	(Ketetapan) Menyatakan Permohonan Pemohon Gugur.

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Dapil	Putusan
	DPRD/XVII/2019	Tahun 2019			
12.	247-06-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Maluku Tahun 2019	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda)	?	(Ketetapan) Mengabulkan Penarikan Kembali Permohonan Pemohon.
13.	250-00-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Papua Tahun 2019	Purwn. Paus Kogoya, S.I.P.,	PAPUA; Papua 4; Papua 5; Papua 6; Jayawijaya 1; Jayawijaya 2; Jayawijaya 3; Jayawijaya 4; Lanny Jaya 1; Lanny Jaya 2; Lanny Jaya 3; Mamberamo Tengah 1; Mamberamo Tengah 2; Mamberamo Tengah 3; Puncak Jaya 1; Puncak Jaya 2; Puncak Jaya 3; Puncak Jaya 4; Tolikara 1; Tolikara 2; Tolikara 3; Tolikara 4; Yahukimo 1; Yahukimo 2; Yahukimo 3; Yahukimo 4; Yahukimo 5; Yahukimo 6	(Ketetapan) Menyatakan Permohonan Pemohon Gugur.
14.	181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Bengkulu Tahun 2019	Partai Golongan Karya (Partai Golkar)	Bengkulu 2	Dalam Eksepsi: Mengabulkan Eksepsi Termohon sepanjang mengenai Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon; Menolak Eksepsi Termohon, untuk selain dan selebihnya;

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Dapil	Putusan
					<u>Dalam Pokok Permohonan:</u> Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.
15.	228-07-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Bengkulu Tahun 2019	Partai Beringin Karya (Partai Berkarya)	?	<u>(Ketetapan)</u> Menyatakan Permohonan Pemohon Gugur.
16.	107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Bengkulu Tahun 2019	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Bengkulu 3	<u>Dalam Eksepsi:</u> Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk sebagian, sepanjang mengenai Permohonan Pemohon Tidak Jelas atau Kabur Menolak Eksepsi Termohon, untuk selain dan selebihnya; <u>Dalam Pokok Permohonan:</u> Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.
17.	153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Bali Tahun 2019	Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra)	Bali 1	<u>Dalam Eksepsi:</u> Menolak Eksepsi Termohon; Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait, sepanjang mengenai Permohonan Pemohon Tidak Jelas atau Kabur; <u>Dalam Pokok Permohonan:</u> Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Dapil	Putusan
18.	30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 2019	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) (Perseorangan)	DI Yogyakarta 4	<p><u>Dalam Eksepsi:</u> Menolak Eksepsi Termohon;</p> <p><u>Dalam Pokok Permohonan:</u> Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.</p>
19.	172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Tahun 2019	Partai Golongan Karya (Partai Golkar)	Kapuas 1	<p><u>Dalam Eksepsi:</u> Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya; Menyatakan Permohonan Pemohon Kabur atau Tidak Jelas;</p> <p><u>Dalam Pokok Permohonan:</u> Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.</p>
20.	57-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Tahun 2019	Partai Demokrat (Perseorangan)	Kapuas 2	<p><u>Dalam Eksepsi:</u> Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya; Menyatakan Permohonan Pemohon Kabur atau Tidak Jelas;</p> <p><u>Dalam Pokok Permohonan:</u> Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.</p>
21.	129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Tahun 2019	H. Adie Seth Jinu (Partai Amanat Nasional (Caleg PAN)	Gunung Mas 2	<p><u>Dalam Eksepsi:</u> Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk sebagian, sepanjang mengenai Permohonan Pemohon Salah</p>

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Dapil	Putusan
					<p>Obyek Perkara atau <i>Error in Objectum</i>; Menolak Eksepsi Termohon, untuk selain dan selebihnya;</p> <p><u>Dalam Pokok Permohonan:</u> Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.</p>
22.	167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019	Partai Golongan Karya (Partai Golkar)	Bintan 3; Kota Batam 1	<p><u>Dalam Eksepsi:</u> Menolak Eksepsi Termohon;</p> <p><u>Dalam Pokok Permohonan:</u> Menyatakan Permohonan Pemohon sepanjang Dapil Kota Batam 1, Tidak Dapat Diterima;</p> <p>Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Sebagian, sepanjang Dapil Bintan 3;</p> <p>Membatalkan Keputusan KPU 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019, sepanjang menyangkut perolehan suara Partai Golkar untuk Pemilihan Anggota DPRD Kab. Bintan, untuk Dapil Bintan 3;</p>

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Dapil	Putusan
					Menetapkan perolehan suara yang benar untuk Partai Golkar untuk Pemilihan Anggota DPRD Kab. Bintan, untuk TPS 12 Sungai Lekop, Kec. Bintan Timur, Kab. Bintan; Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. (cek Salinan putusan)
23.	239-06-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda)	Kota Tanjung Pinang 2	<u>Dalam Eksepsi:</u> Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk sebagian, sepanjang mengenai Permohonan Pemohon Tidak Jelas atau Kabur Menolak Eksepsi Termohon, untuk selain dan selebihnya; <u>Dalam Pokok Permohonan:</u> Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.
24.	71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	Bintan 3; Kota Batam 1	<u>Dalam Eksepsi:</u> Menolak Eksepsi Termohon; <u>Dalam Pokok Permohonan:</u> Menyatakan Permohonan Pemohon sepanjang Dapil Kota Batam 1, Tidak Dapat Diterima;

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Dapil	Putusan
					<p>Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Sebagian, sepanjang Dapil Bintang 3;</p> <p>Membatalkan Keputusan KPU 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019, sepanjang menyangkut perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera untuk Pemilihan Anggota DPRD Kab. Bintang, untuk Dapil Bintang 3;</p> <p>Menetapkan perolehan suara yang benar untuk Partai Keadilan Sejahtera untuk Pemilihan Anggota DPRD Kab. Bintang di Dapil Bintang 3, yaitu sebanyak 1.645 suara;</p> <p>Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.</p> <p>(cek Salinan putusan)</p>
25.	135-09-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019	Partai Persatuan Indonesia (Partai Perindo)	Kep. Riau 4; Kota Batam 1	<p>(Ketetapan) Mengabulkan Penarikan Kembali Permohonan Pemohon.</p>

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Dapil	Putusan
26.	146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019	Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra)	Kep. Riau 4; Kota Batam 6	<p><u>Dalam Eksepsi:</u> Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak terkait;</p> <p><u>Dalam Pokok Permohonan:</u> Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian, sepanjang DPRD Provinsi Kep. Riau untuk Dapil Kep. Riau 4;</p> <p>Membatalkan Keputusan KPU 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019, sepanjang menyangkut perolehan suara untuk Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Kep. Riau untuk Dapil Kep. Riau 4;</p> <p>Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.</p> <p>(cek Salinan putusan)</p>

REKAP AMAR PUTUSAN PHPU PILEG 2019
6 AGUSTUS 2019 – 19.00

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Dapil	Putusan
1.	51-14-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Tahun 2019	Partai Demokrat	Sijunjung 3	<p><u>Dalam Eksepsi:</u> Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya; Menyatakan Permohonan Pemohon Kabur atau Tidak Jelas;</p> <p><u>Dalam Pokok Permohonan:</u> Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.</p>
2.	73-03-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Tahun 2019	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	SUMBAR I	<p><u>Dalam Eksepsi:</u> Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya; Menyatakan Permohonan Pemohon Kabur atau Tidak Jelas;</p> <p><u>Dalam Pokok Permohonan:</u> Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.</p>
3.	69-03-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) Tahun 2019	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	JABAR VII	<p><u>Dalam Eksepsi:</u> Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya; Menyatakan Permohonan Pemohon Kabur atau Tidak Jelas;</p> <p><u>Dalam Pokok Permohonan:</u> Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.</p>

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Dapil	Putusan
4.	64-14-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Tahun 2019	Partai Demokrat	KALTIM; Paser 2	<p><u>Dalam Eksepsi:</u> Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya; Menyatakan Permohonan Pemohon Kabur atau Tidak Jelas;</p> <p><u>Dalam Pokok Permohonan:</u> Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.</p>
5.	118-12-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Tahun 2019	Partai Amanat Nasional (PAN)	Kota Samarinda 4	<p><u>Dalam Eksepsi:</u> Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya; Menyatakan Permohonan Pemohon Kabur atau Tidak Jelas;</p> <p><u>Dalam Pokok Permohonan:</u> Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.</p>
6.	140-09-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Tahun 2019	Partai Persatuan Indonesia (Partai Perindo)	Berau 4	<p><u>Dalam Eksepsi:</u> Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya; Menyatakan Permohonan Pemohon Kabur atau Tidak Jelas;</p> <p><u>Dalam Pokok Permohonan:</u> Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.</p>
7.	15-01-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kalimantan	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Kalbar 6	<p><u>Dalam Eksepsi:</u> Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;</p>

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Dapil	Putusan
		Barat (Kalbar) Tahun 2019			Menyatakan Permohonan Pemohon Kabur atau Tidak Jelas; <u>Dalam Pokok Permohonan:</u> Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.
8.	56-14-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2019	Partai Demokrat	NTB 8; Lombok Barat 2	<u>Dalam Eksepsi:</u> Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya; Menyatakan Permohonan Pemohon Kabur atau Tidak Jelas; <u>Dalam Pokok Permohonan:</u> Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.
9.	77-03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2019	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	Dompu 3	<u>Dalam Eksepsi:</u> Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya; Menyatakan Permohonan Pemohon Kabur atau Tidak Jelas; <u>Dalam Pokok Permohonan:</u> Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.
10.	160-02-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2019	Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra)	Lombok Tengah 6	<u>Dalam Eksepsi:</u> Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya; Menyatakan Permohonan Pemohon Kabur atau Tidak Jelas;

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Dapil	Putusan
					<u>Dalam Pokok Permohonan:</u> Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.
11.	133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Tahun 2019	Partai Persatuan Indonesia (Partai Perindo)	Kep. Talaud 3	<u>Dalam Eksepsi:</u> Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya; Menyatakan Permohonan Pemohon Cacat Formil; <u>Dalam Pokok Permohonan:</u> Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.
12.	163-02-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Tahun 2019	Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra)	Kep. Sangihe 2	<u>Dalam Eksepsi:</u> Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya; Menyatakan Permohonan Pemohon Kabur atau Tidak Jelas; <u>Dalam Pokok Permohonan:</u> Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.
13.	204-11-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Tahun 2019	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	Minahasa Utara 4	<u>Dalam Eksepsi:</u> Menolak Eksepsi Termohon berkaitan dengan Kewenangan Mahkamah; Menyatakan Permohonan Pemohon Kabur atau Tidak Jelas; <u>Dalam Pokok Permohonan:</u> Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Dapil	Putusan
					Diterima.
14.	98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) Tahun 2019	Partai Bulan Bintang (PBB)	Morowali Utara 1; Parigi Moutong 1	<p><u>Dalam Eksepsi:</u> Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya; Menyatakan Permohonan Pemohon Kabur atau Tidak Jelas;</p> <p><u>Dalam Pokok Permohonan:</u> Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.</p>
15.	147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) Tahun 2019	Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra)	Sulteng 2	<p><u>Dalam Eksepsi:</u> Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya; Menyatakan Permohonan Pemohon Kabur atau Tidak Jelas;</p> <p><u>Dalam Pokok Permohonan:</u> Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.</p>
16.	08-08-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Tahun 2019	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Kep. Selayar 5	<p><u>Dalam Eksepsi:</u> Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya; Menyatakan Permohonan Pemohon Kabur atau Tidak Jelas;</p> <p><u>Dalam Pokok Permohonan:</u> Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.</p>

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Dapil	Putusan
17.	62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Tahun 2019	Partai Demokrat	SULSEL III; Gowa 1; Luwu Timur 2	<p><u>Dalam Eksepsi:</u> Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya; Menyatakan Permohonan Pemohon Kabur atau Tidak Jelas;</p> <p><u>Dalam Pokok Permohonan:</u> Menyatakan Permohonan Pemohon sepanjang Permohonan DPR RI Dapil SULSEL III yang diajukan perseorangan atas nama; DPRD Kab. Luwu Timur Dapil Luwu Timur 2; dan DPRD Kab. Gowa Dapil Gowa 1 yang diajukan perseorangan atas nama , Gugur</p> <p>Menyatakan Permohonan Pemohon sepanjang Permohonan DPR RI Dapil SULSEL III yang diajukan perseorangan atas nama , Tidak Dapat Diterima.</p> <p>(cek Salinan putusan)</p>
18.	101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Tahun 2019	Partai Bulan Bintang (PBB)	Sinjai 2	<p><u>Dalam Eksepsi:</u> Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya; Menyatakan Permohonan Pemohon Kabur atau Tidak Jelas;</p> <p><u>Dalam Pokok Permohonan:</u> Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.</p>
19.	60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Maluku Utara	Partai Demokrat	Malut 2	<p><u>Dalam Eksepsi:</u> Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;</p>

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Dapil	Putusan
		(Malut) Tahun 2019			Menyatakan Permohonan Pemohon Kabur atau Tidak Jelas; <u>Dalam Pokok Permohonan:</u> Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.
20.	211-07-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut) Tahun 2019	Partai Beringin Karya (Partai Berkarya)	Malut 1	<u>Dalam Eksepsi:</u> Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya; Menyatakan Permohonan Pemohon Kabur atau Tidak Jelas; <u>Dalam Pokok Permohonan:</u> Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.
21.	01-32/PHPU-DPD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPD Provinsi Maluku Utara (Malut) Tahun 2019	Ir. Tjatur Sapto Edy, M.T.	MALUKU UTARA	<u>Dalam Eksepsi:</u> Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya; Menyatakan Permohonan Pemohon Kabur atau Tidak Jelas; <u>Dalam Pokok Permohonan:</u> Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

Kesekretariatan KPU di Mahkamah Konstitusi
Gdg. Kementerian Koordinator Perekonomian RI Lt. 4